

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang tertuang pada BAB IV, maka dapat diambil kesimpulan dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Bagian Kominfo Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang sebagai penyelenggara komunikasi layanan informasi publik, dalam menjalankan tugasnya Bagian Kominfo memiliki strategi pelaksanaan dengan tahapan-tahapan berupa pembuatan aplikasi-apikasi online, pertukaran data antar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), media center, kerjasama Pers, dan keterlibatan Masyarakat. Dalam setiap tahapannya Bagian Kominfo Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang berupaya melayani publik dengan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana. Dengan pengaturan dan pengembangan terhadap penyelenggaraan pemerintah terkait komunikasi dan informatika, penyelenggaraan sistem pelayanan yang terjangkau diharapkan dapat membantu publik dalam memenuhi kebutuhannya atas informasi.
2. Tugas Bagian Kominfo Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang dalam menjalankan perannya sebagai media penyelenggara informasi publik dalam instansi pemerintahan yakni terkait pengabdian kepada kepentingan umum, pemeliharaan komunikasi yang baik, dan menitikberatkan moral dan

perilaku yang baik. Bertujuan memberikan pelayanan terbaik atas hak informasi setiap rakyat dan mampu mengembangkan citra positif dalam pemerintahan.

3. Faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas Bagian Kominfo Setda Pemkab Serang diantaranya adalah sarana fasilitas kantor sudah lengkap, dukungan anggaran sebagai pelaksanaan sistem kerja Bagian kominfo telah disiapkan cukup besar, Staff yang ada pada Bagian Kominfo memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya, dan hubungan dengan media massa terjalin cukup baik.
4. Kendala yang sering kali dihadapi dalam pelaksanaan tugas Bagian Kominfo Setda Pemkab Serang yaitu birokrasi masih ragu-ragu untuk memberikan informasi kepada masyarakat takut menjadi viral, dan terkadang pemohon informasi tidak murni meminta informasi/memiliki agenda atau tujuan lain, paradigma masyarakat dengan perkembangan teknologi informasi yang masih awam, dari segi kontur infrastruktur yang masih perlu dikembangkan, budaya materi yang masih sangat kental pada masyarakat sekitar.

#### **1. Saran**

Adapun saran yang ingin disampaikan oleh peneliti adalah:

1. Hendaknya strategi pengembangan pelayanan informasi publik pada Bagian Kominfo Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang harus terus menerus diberdayakan dengan pengolahan data-data terbaru. Sehingga pola komunikasi dua arah dalam pemerintahan dapat menciptakan *feed back* yang

baik, dan publik dapat mengetahui dengan jelas apa saja kebijakan-kebijakan dalam pemerintahan.

2. Media massa sebagai *control social* dapat berperan aktif dalam mengembangkan citra Pemerintahan Kabupaten Serang, oleh karena itu menjaga hubungan baik dengan media massa sangat ditekankan dalam pertukaran informasi. Sehingga kesimpangsiuran informasi dalam birokrasi dapat dihindari dengan sedini mungkin.
3. Pejabat pemerintahan yang ditunjuk oleh rakyat sebagai wakil rakyat, hendaknya terus menerus meningkatkan pelayanan terbaiknya dalam penyelenggaraan komunikasi informasi layanan publik dalam pemerintahan. Di era keterbukaan informasi, pemerintah hendaknya lebih progresif dalam menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan yang ada di pemerintahan, sehingga mampu mengedukasi masyarakat dengan perencanaan yang matang.
4. Faktor perubahan sosial masyarakat dari beberapa aspek seperti faktor alam, faktor teknologi, dan faktor budaya dalam penerapan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi dalam ruang lingkup masyarakat Kabupaten Serang, yang harus perlu ditekankan adalah pada aspek perubahan sosial yang menyangkut pada perubahan pola pikir masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan perubahan budaya materi. Dimana perubahan pola pikir dan sikap masyarakat Kabupaten Serang yang mayoritas berpenduduk dengan budaya tradisional dihadapkan pada persoalan sosial dan budaya disekitarnya

yang berakibat terhadap pemerataan pola-pola pikir baru yang dianut sebagai yang modern. Sehingga peran pemerintah dalam menanggulangi kedangkalan berpikir yang berdampak pada sikap yang menyimpang adalah dengan terus mengawasi masyarakat dengan undang-undang yang melindungi setiap kebijakan pemerintah yang dibuat dan memberikan sanksi tegas pada setiap pelanggaran baik publik internal maupun eksternal.